

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Globalisasi telah ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi ini akan mempengaruhi struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta akan mempengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan masyarakat. Dalam menghadapi globalisasi dan mengisi kemerdekaan, kita memerlukan perjuangan sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Untuk mendukung profesionalis yang dimaksud memerlukan sarana kegiatan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara sebagaimana ditegaskan dalam UU. No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa “warga negara yang memiliki kompetensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus (pasal 5 ayat 4)” begitu pula dalam pasal 12(ayat 1) dinyatakan bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: (b) mendapatkan pelayanan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Upaya menciptakan sistem pendidikan nasional yang mantap serta mampu menjawab tantangan masa kini dan masa depan, pendidikan dewasa ini terus ditata dan dikembangkan dengan memberikan prioritas pada aspek-aspek yang dipandang strategis bagi masa depan bangsa. Prioritas tersebut adalah pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang bersamaan dengan peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi pada semua jenis dan jenjang jalur pendidikan.

Ada beberapa tujuan pendidikan yang mendasar, yaitu untuk mempersiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik individu maupun secara kolektif, sebagai warga masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Tujuan atau fungsi pendidikan lainnya adalah mencapai peradaban, artinya pendidikan bermanfaat mencapai suatu tingkat peradaban.

Dalam UUD tahun 1945 pasal 31 ayat (5) dinyatakan bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”

Dengan pencapaian tujuan tersebut, pemerintah berupaya sedemikian rupa guna mengembangkan potensi pada dunia pendidikan. Diantaranya ialah dengan memberikan bantuan dana pada sekolah-sekolah seperti, BOS, OPF, Beasiswa, baik beasiswa kepada siswa yang kurang mampu maupun beasiswa kepada siswa yang berprestasi. Selain itu juga saat ini pemerintah menggalakkan sekolah gratis bagi siswa sekolah dasar (SD), dan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), serta masih banyak lagi upaya pemerintah dalam pencapaian tujuan pendidikan dan pembiayaannya yang dialokasikan dalam bentuk dana APBN, seperti yang di amanatkan dalam UUD Tahun 1945 pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Peraturan pemerintah RI No I9 Tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan bahwa Standar pengelolaan adalah standar yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten/kota/provinsi atau nasional, agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

Mulyasa (2002:171) mengemukakan bahwa “keuangan dan pembiayaan sangat menentukan ketercapaian tujuan pendidikan di sekolah, yang memerlukan sejumlah investasi dari anggaran pemerintah, dan dana masyarakat.”Investasi harus dikelola secara efektif dan efisien dan diarahkan langsung terhadap pencapaian tujuan. Berkaitan dengan anggaran sistem pengawasan perlu ditingkatkan guna untuk menghindari hal-hal yang mengakibatkan kemungkinan terjadinya

penyelewengan dan penggelapan keuangan. Pengawasan dana misalnya, setiap penerimaan dan pengeluarannya perlu diadakan pelaporan, sehingga dari laporan tersebut diperoleh informasi yang dapat digunakan oleh para pemakai informasi untuk mengetahui seberapa besar dana yang telah diterima dan pengeluaran yang terjadi, serta diperuntukkan untuk apa dana tersebut.

Osborne dan Gaebler (dalam sudarwan 2008:139) mengemukakan bahwa “Khusus untuk institusi persekolahan atau sekolah pada umumnya, anggaran yang digerakkan oleh misi akan memberikan dampak positifnya setidaknya secara hipotesis dan kualitatif.” Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan praktik-praktik penyelenggaraan sekolah, baik yang dikelola secara konvensional maupun MBS, yang menuntut profesional kepala sekolah dalam mengelola keuangan sekolah, baik melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya.

Setiap tahun anggaran sekolah dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua dana yang dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Pertanggung jawaban ini dilakukan didalam rapat dewan sekolah, yang diikuti komponen sekolah, komponen masyarakat dan pemerintah daerah. Proses ini menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak-pihak yang berhak.

Dalam penggunaan dana pengelolaan sangatlah penting, karena pengelolaan itu merupakan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan

pencapaian tujuan, (kamus besar bahasa indonesia 2008:657). Selain itu, Wardoyo (1980:41) mengemukakan bahwa “Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), hendaknya diarahkan untuk meningkatkan aktivitas pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh sebab itu, kualitas pengetahuan dan keterampilan pengelolaan keuangan sangat diperlukan guna memaksimalkan hasil yang dicapai. Agar tujuan dan sasaran program dana BOS dapat dicapai, maka kepala sekolah bersama guru perlu menyusun strategi pengelolaan dana BOS secara baik. Pihak sekolah harus proaktif melibatkan komite dan seluruh guru dalam pengelolaan dana BOS. Dalam konteks ini koordinasi perlu dilakukan secara kontinu, sehingga *stakeholder* pendidikan yang ada di sekolah mengetahui pengelolaan dana BOS secara transparan, demikian pula sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS, sehingga pemanfaatan dana BOS benar - benar dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Untuk mencapai tingkat pengelolaan dana BOS yang maksimal, perlu dilakukan kegiatan perencanaan, penyusunan program, dan kegiatan pelaksanaan pengelolaan dana BOS, demikian pula kegiatan evaluasi yang dilaksanakan juga perlu melibatkan segenap *stakeholder* pendidikan, sehingga semua komponen sekolah memiliki akuntabilitas terhadap pengelolaan dana BOS. Hasil temuan dalam kegiatan evaluasi perlu dikomunikasikan kepada seluruh *stakeholder* pendidikan, sehingga dapat diketahui secara pasti pengelolaan dan penggunaan dana BOS yang ada di sekolah. Selain itu, evaluasi pula memiliki fungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pengelolaan dana BOS serta menjadi bahan komparasi untuk pengelolaan selanjutnya. Dengan pengelolaan

dana BOS yang maksimal diharapkan pula dapat memaksimalkan hasil yang dicapai serta benar –benar mencapai sasaran yang diharapkan agar dapat menciptakan pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan survei awal dan wawancara dengan beberapa tenaga pengajar di MTs Nurul Bahri Kabila Bone, telah menerima bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana tersebut telah digunakan dan dimanfaatkan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. MTs Nurul Bahri Kabila Bone telah menerima dana bantuan operasional sekolah sejak tahun 2005 dan berlanjut sampai sekarang.

Beberapa gambaran umum permasalahan yang ditemukan di lapangan mengenai mekanisme penggunaan dana bantuan operasional sekolah belum maksimal serta ketepatan waktu pencairan dana bantuan operasional sekolah yang dicairkan setiap triwulan dibulan pertama pertanggungjawaban keuangannya belum dilaporkan, sehingga pada saat sekolah membutuhkan dana pada akhir semester berjalan dana tersebut belum dicairkan. Disisi lain masih kurangnya koordinasi yang dibangun sehingga menimbulkan kurang efektifnya implementasi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada MTs Nurul Bahri Kabila Bone.

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, maka peneliti terdorong untuk melakukan suatu kajian ilmiah dengan formulasi judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di MTs Nurul Bahri Kabila Bone”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Perencanaan program dana Bantuan Operasional Sekolah di MTs Nurul Bahri Kabila Bone

2. Akuntabilitas Pelaksanaan program dana Bantuan Operasional Sekolah di MTs Nurul Bahri Kabila Bone
3. Akuntabilitas Pelaporan program dana Bantuan Operasional Sekolah di MTs Nurul Bahri Kabila Bone.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akuntabilitas perencanaan dana Bantuan Operasional Sekolah di MTs Nurul Bahri Kabila Bone
2. Untuk mengetahui akuntabilitas pelaksanaan program dana Bantuan Operasional Sekolah di MTs Nurul Bahri Kabila Bone
3. Untuk mengetahui akuntabilitas pelaporan program dana Bantuan Operasional Sekolah di MTs Nurul Bahri Kabila Bone

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis.

Dari penelitian ini, penulis mendapatkan pengetahuan dan pengalaman berharga tentang tatacara dan prosedur penelitian khususnya dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, dapat memberikan informasi kepada Tim Pelaksana (Panitia), tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

E. Definisi Operasional Penelitian.

- a.** Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui satu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.
- b.** Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.